



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDY WIJANARKO
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 843995

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/40 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 273.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU M602RS-MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ GKS 1.5 RS MT 9CKD) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
3. MOTOR, HONDA E1F02N11M2 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
4. MOTOR, HONDA SCOOPI HONDA/F1C02N46L0 AT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 44.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 114.403.715

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.222.103.715

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.222.103.715



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.